

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfitra. (2014). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Asser.
- Ali, Achmad. (2015). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Prenada Media.
- Amin, Rahman. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta : Dee Publish.
- Arto, Mukti. (2017). *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Depok : Kencana.
- Asikin, Zainal. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Asnawi, M. Natsir. (2020). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadrian, Endang. (2020). *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2017) . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi : Unimal Press
- Jonaedi, Efendi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Ditya Bakti.
- M. Gultom, Binsar. (2020). *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Subekti. (2007). *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Sunggono, Bambang. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Herzien Indonesis Reglement, Staatsblad Nomor 16 jo. 57 Tahun 1848 dan *Staatsblad* Nomor 31,32, dan 44 Tahun 1941.

Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927.

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering, Staatsblad Nomor 52 Tahun 1987.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Staatblad* Nomor 23 Tahun 1847.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

JURNAL

Ardina Prafitasari. (2016). *Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi*. Jurnal Translitera, 4(1): 6-18.
<https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>

Dirgantara, Febrian. (2018). *Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah : Apakah Ada?*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3): 11-18.

- Azhar, Fachrizal. (2021). *Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Pada Perkara Perdata*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 1 (1) : 5 -15.
- Indah, Sucianti. (2020). *Implementasi Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Terhadap Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Shautuna, 1(3): 7-16. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14911>
- Indrasari, Febrina. (2015). *Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta*. Jurnal Jurisprudence, 5(1): 4-6. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4216>
- Lengkong, Lonna Yohanes. (2017). *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Pada Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata*. Jurnal Hukum To-Ra, 3(1): 7-15.
- Manshold, Rico. (2023). *Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata*. Jurnal Lex Administratum, 12 (5) : 8-17.
- Rosalina, Maria. (2018). *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat*. Doktrina : Jurnal Of Law, 1(2): 12-21. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1924>
- Wahyu Sururie, Ramdani. (2022). *Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak*. Jurnal Yudisial, 15(2): 6-19. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.500>

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Aprianti, Rieya. (2014). *Tinjauan Yuridis Terkait Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia).

Putripta, Sindy. (2022). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Gugatan Hak Asuh Anak Yatim Piatu* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Sulistiyono. (2014). *Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kalianda* (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Lampung).

WAWANCARA

Wawancara secara langsung dengan Bapak Ali Sobirin, SH., MH. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Selasa, 26 September 2023.

Wawancara secara langsung dengan Bapak Agus Sukaryo, SH. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Selasa, 26 September 2023

Wawancara secara online dengan bapak Purwanto, SH. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari senin, 29 Januari 2024.

Wawancara secara online dengan bapak Samsul Hadi, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 29 Januari 2024.